



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Web : <http://bpbd.tanjabbarkab.go.id> email : bpbd@tanjabbarkab.go.id



Mgosoft PDF Split Merge



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



KUALA TUNGKAL, 2019

Mgosoft PDF Split Merge

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Akhir Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Akhir Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan dan ini merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Kerja Akhir Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal, Agustus 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. KOSASIH
NIP.19591230 198103 1 008

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD..... | 8 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 10 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 12 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 15 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 21 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 22 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 22 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 | 24 |
| BAB IV PENUTUP | 31 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang dilakukan dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen penerjemah dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk menetapkan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui capaian kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD pada tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Profinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mgosoft PDF Split Merge

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna);
30. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 050/2080/Bappemdal tentang Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Tahun 2018 program kegiatan bidang kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
2. Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB)
3. Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
5. Pencegahan Dini Pencegahan Karhutla

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2018 yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam adalah sebesar Rp.8.886.198.369,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.145.642.851,- atau penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 bidang bencana sebesar 92,06% dari total anggaran yang dialokasikan.

Adapun Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Posko Bencana berupa belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi merupakan bantuan (Hibah) dari Pusat, merekonstruksi Sungai Papalik di Kecamatan Muara Papalik berupa pembangunan Turap dan Normalisasi Sungai sepanjang 13 Km, pelaksanaan pembangunan pada tahun 2018, Rp.4.262.150.100.- dengan realisasi sebesar Rp.4.138.369.024 atau penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2018 Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar 97,10% dari anggaran yang dialokasikan.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk

mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan telah dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- b. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun capaian Renstra SKPD untuk masing-masing program kegiatan rata-rata persentase sudah mencapai target dari target capaian yang telah ditetapkan 100 % yaitu terlaksananya sasaran strategis, indikator kinerja outcome, dan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan outcome kegiatan meningkatnya patroli harian dan patroli gabungan dan meningkatnya pengetahuan dasar masyarakat terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
2. Terwujudnya dan meningkatnya interaksi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif, cepat, dan tepat, dengan outcome kegiatan meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat.
4. Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan sistem logistik, dengan outcome kegiatan meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan, sarana prasarana, dan sistem logistik.
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparatur, Satuan Tugas, Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana, dengan outcome kegiatan meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat, jumlah TRC, jumlah masyarakat/relawan terlatih dan terampil.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kinerja pelayanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.

SPM Bencana terdiri dari (1) Indeks resiko bencana kabupaten (2) Jumlah jenis potensi bencana kabupaten.

Adapun capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Mgosoft PDF Split Merge

Tabel T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Resntra SKPD | | | | | | Realisasi Capaian dan Proyeksi | | | | | | Catatan Analisa |
|-----|---|-----------------------------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Standar IKK (PP 6/2008) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SPM BENCANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Indeks Risiko Bencana Kabupaten | 156 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | b) Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |

Mgosoft PDF Split Merge

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana;
5. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di semua wilayah terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Permasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama misi kedua yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup”**. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD

tetapi merupakan kegiatan multi sektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu :

1. Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.
5. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
7. Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
8. Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

Formulasi isu-isu penting berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
2. Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat.
3. Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
5. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
7. Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
8. Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
9. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
10. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
11. Peningkatan informasi dini potensi bencana
12. Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
13. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
14. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana
15. Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap rancangan akhir RKPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Mgosoft PDF Split Merge

TABEL T.VI.C.7
Mgosoft PDF Split Merge
DI EXCEL

TABEL T.VI.C.7

Mgosoft PDF Split Merge

TABEL T.VI.C.7

Mgosoft PDF Split Merge

TABEL T.VI.C.7
DI EXCEL
Mgosoft PDF Split Merge

TABEL T.VI.C.7

Mgosoft PDF Split Merge

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh dari penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/aspirasi masyarakat dan musrenbang kecamatan. Kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana.

Untuk tahun 2019 tidak ada program dan kegiatan usulan dari masyarakat/aspirasi masyarakat pada musrenbang kecamatan.

Mgosoft PDF Split Merge

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah **mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana** yang dilaksanakan melalui strategi internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah, Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana serta Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dengan ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas nasional dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah, serta dengan adanya arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan terkait dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana maka BPBD selaku penyelenggara penanggulangan bencana di daerah berkewajiban menjabarkan kebijakan tersebut kedalam kegiatan-kegiatan konkrit yang bertitik tolak dari rencana penanganan bencana mulai dari identifikasi ancaman bencana, analisis resiko bencana sampai dengan program kegiatan dan fokus prioritas yang akan diambil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung

Barat 2016-2021 yaitu “**TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS**”, Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut yaitu:

“TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL”.

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara profesional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat/stakeholders dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat/stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana.

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Melaksanakan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi seluruh stakeholders dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta *Stakeholders* berkaitan dengan bidang kebencanaan.

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
8. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sistem logistik;
9. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat/stakeholders dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.

Mgosoft PDF Split Merge

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, cuaca ekstrim dan kekeringan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian menjadi salah satu faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 terdiri dari 8 program dan 38 kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pengembangan SDM

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

- 1) Pemberdayaan masyarakat/desa tangguh bencana
- 2) Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana
- 3) Pelatihan mitigasi dan pemberdayaan masyarakat desa tangguh bencana
- 4) Pembuatan leaflet, brosur dan baleho penanggulangan resiko bencana
- 5) Kegiatan pembinaan kader siaga bencana
- 6) Dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- 7) Penyusunan rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan bencana
- 8) Pemberdayaan relawan penanggulangan bencana

- 9) Rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- 10) Penyelenggaraan penanganan tanggap darurat di daerah terkena bencana
- 11) Pembentukan tim Pembina dan pengarah dan tim koordinasi penanggulangan bencana.
- 12) Pencegahan dini pengendalian karhutla
- 13) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dan sosialisasi PRB.
- 14) Pembekalan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC-PB).
- 15) Pengaktifan posko penanggulangan bencana (PB) dan penanganan darurat di daerah terkena bencana.
- 16) Pembentukan dan pelatihan pemantapan manajemen pusdalops (pusat pengendalian operasional) penanggulangan bencana.
- 17) Kegiatan peningkatan pengembangan SIM data kebencanaan
- 18) Kegiatan fasilitas dan koordinasi peningkatan dan pemulihan fisik Sosial Ekonomi di wilayah Pasca Bencana (prasarana dan sarana fisik).
- 19) Kegiatan fasilitas dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial Ekonomi di wilayah Pasca Bencana (sosial ekonomi masyarakat).
- 20) Kegiatan kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan pembentukan Tim JITUPASNA.
- 21) Kegiatan penyusunan pelaporan pengawasan serta evaluasi penyelenggraan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Microsoft Excel Split Merge TABEL PDF DI EXCEL

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Melalui rencana kerja ini dapat dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.,

Selain itu Renja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Mgosoft PDF Split Merge

Kuala Tungkal, Agustus 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. KOSASIH
Pembina Utama Muda
NIP.19591230 198103 1 008

Tabel.T-VI.C.10
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | |
| | 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Rp 670.577.554 | | | | Rp 737.635.309 |
| | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Surat Menyurat | Kabupaten | 12 bulan | Rp 990.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 1.089.000 |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. | Kabupaten | 12 bulan | Rp 63.360.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 69.696.000 |
| | 03 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten | 12 bulan | Rp 85.250.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 93.775.000 |
| | 04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 10.271.510 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 10.198.661 |
| | 05 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 34.358.294 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 37.794.123 |
| | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kabupaten | 12 bulan | Rp 29.370.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 32.307.000 |
| | 07 | Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor. | Kabupaten | 12 bulan | Rp 4.906.550 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 5.397.205 |
| | 08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. | Kabupaten | 12 bulan | Rp 13.200.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 14.520.000 |
| | 09 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten | 12 bulan | Rp 2.640.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 2.904.000 |
| | 10 | Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah. | Kabupaten | 12 bulan | Rp 427.231.200 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 469.954.320 |
| | 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | Rp 436.095.000 | | | | Rp 479.704.500 |
| | 01 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 16.995.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 18.694.500 |
| | 02 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Kabupaten | 12 bulan | Rp 341.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 375.100.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|------|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (11) | (12) |
| | 03 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 55.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 1 pkt | Rp 60.500.000 |
| | 04 | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Gedung Kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 23.100.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 25.410.000 |
| 3. | 05 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | Rp 53.350.000 | | | | Rp 58.685.000 |
| | 01 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kabupaten | 85 orang | Rp 53.350.000 | APBD KAB | Kabupaten | 85 orang | Rp 58.685.000 |
| 4. | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | 17.600.000 | | | | Rp 19.360.000 |
| | 01 | Pengembangan SDM | Luar Kabupaten/ Provinsi | 4 orang | Rp 17.600.000 | APBD KAB | Luar Kabupaten/ Provinsi | 4 orang | Rp 19.360.000 |
| 5. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 57.090.000 | | | | Rp 62.799.000 |
| | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja, Ikhtisar realisasi kinerja | Kabupaten | 12 bulan | Rp 57.090.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 bulan | Rp 62.799.000 |
| | | Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 6. | | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam | | | Rp 5.476.445.375 | | | | Rp 6.024.089.913 |
| | 01 | Pemberdayaan masyarakat/desa tangguh bencana | Kabupaten | 13 kali | Rp 220.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 13 kali | Rp 242.000.000 |
| | 02 | Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana | Kabupaten | 1 Raperda | Rp 300.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 1 Raperda | Rp 330.000.000 |
| | 03 | Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana | Kabupaten | 5 Desa | Rp 31.998.725 | APBD KAB | Kabupaten | 5 Desa | Rp 35.198.598 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|------|--|--|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (11) | (12) |
| 04 | Pembuatan leaflet, brosur dan baleho pengurangan resiko bencana | Jumlah cetak leaflet, brosur dan baleho pengurangan resiko bencana | Kabupaten | 40 SKPD/ instansi terkait/ 21 orang | Rp 250.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 40 SKPD/ instansi terkait/ 21 orang | Rp 275.000.000 |
| 05 | Kegiatan pembinaan kader siaga bencana | Jumlah Siswa yang siaga bencana | Kabupaten | 30 orang | Rp 250.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 30 orang | Rp 275.000.000 |
| 06 | Dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten | Jumlah dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten | Kabupaten | 5 Dokumen | Rp 150.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 5 Dokumen | Rp 165.000.000 |
| 07 | Penyusunan rencana aksi (RAD) penanggulangan bencana | Jumlah dokumentasi RAD penanggulangan bencana kabupaten | Kabupaten | 12 Dokumen laporan PB | Rp 341.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 Dokumen laporan PB | Rp 375.100.000 |
| 08 | Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana | Jumlah tenaga relawan yang dilatih dalam penanggulangan bencana | Kabupaten | 5 Desa | Rp 340.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 5 Desa | Rp 374.000.000 |
| 09 | Rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana | Jumlah rapat kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan | Kabupaten | 12 kali rapat | Rp 130.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 kali rapat | Rp 143.000.000 |
| 10 | Penyelenggaraan penanganan tanggap darurat di daerah terkena bencana | 1.persentase korban bencana yang ditangani 2.penyelamatan jiwa/warta dan lingkungan serta lingkungan di paparan resiko bencana 3. merespon seluruh kejadian bencana secara tepat dan tanggap | Kabupaten | 100% | Rp 1.481.114.150 | APBD KAB | Kabupaten | 100% | Rp 629.236.565 |
| 11 | Pembentukan tim pembina dan pengarah dan tim koordinasi penanggulangan bencana | Jumlah peserta rakor dan tim yang terbentuk | Kabupaten | 1 Tim | Rp 126.170.000 | APBD KAB | Kabupaten | 1 Tim | Rp 138.787.000 |
| 12 | Pencegahan dini pengendalian karhutla | 1.melakukan patroli gabungan. 2.menyediakan informasi tentang bencana dengan memasang baliho dan cetak leaflet | Kabupaten | 100% | Rp 271.645.000 | APBD KAB | Kabupaten | 100% | Rp 298.809.500 |
| 13 | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dan sosialisasi PRB | Jumlah sosialisasi patroli dan informasi yang disampaikan | Kabupaten | 100% | Rp 84.760.500 | APBD KAB | Kabupaten | 100% | Rp 93.236.550 |
| 14 | Pembekalan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) | Jumlah TRC yang dilatih dan di mantapkan | Kabupaten | 61 orang | Rp 199.650.000 | APBD KAB | Kabupaten | 61 orang | Rp 219.615.000 |
| 15 | Pengaktifan posko penanggulangan bencana (PB) dan penanganan darurat di daerah terkena bencana | Jumlah TRC yang terlibat dalam aktivasi posko dan penanganan darurat | Kabupaten | 40 orang | Rp 266.200.000 | APBD KAB | Kabupaten | 40 orang | Rp 292.820.000 |

Mgsoft PDF Split Merge

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|---------------|---|---|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (11) | (12) |
| 16 | Pembentukan dan pelatihan pemantapan manajemen pusdalops (pusat pengendalian operasional) penanggulangan bencana | Jumlah Pusdalops yang terbentuk dan terlatih | Kabupaten | 50 orang | Rp 182.347.000 | APBD KAB | Kabupaten | 50 orang | Rp 200.581.700 |
| 17 | Kegiatan peningkatan pengembangan SIM Data kebencanaan | Jumlah dokumen pengembangan SIM data kebencanaan | Kabupaten | 12 Dokumen laporan PB | Rp 66.550.000 | APBD KAB | Kabupaten | 12 Dokumen laporan PB | Rp 73.205.000 |
| 18 | Kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana | Jumlah daerah terpulihkan prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana | Kabupaten | 13 kecamatan | Rp 350.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 13 kecamatan | Rp 385.000.000 |
| 19 | Kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana | Jumlah daerah terpulihkan Sosial Ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana | Kabupaten | 13 kecamatan | Rp 250.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 13 kecamatan | Rp 275.000.000 |
| 20 | Kegiatan kajian kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan pembentukan tim JITUPASNA | Terpenuhinya dokumen pengkajian data kebutuhan-kebutuhan pasca bencana, bencana rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dan pembentukan tim JITUPASNA dalam penanggulangan pasca bencana | Kabupaten | 5 dokumen | Rp 150.000.000 | APBD KAB | Kabupaten | 5 dokumen | Rp 165.000.000 |
| 21 | Kegiatan penyusunan pelaporan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi | Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi | Kabupaten | 5 dokumen | Rp 38.500.000 | APBD KAB | Kabupaten | 5 dokumen | Rp 38.500.000 |
| JUMLAH | | | | | Rp 6.711.157.929 | | | Rp 7.382.273.722 | |

Kuala Tungkal, Agustus 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. KOSASIH
NIP.19591230 198103 1 008

Tabel T.VI.C.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPД Tahun 2019
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana

| No. | Kode | Rancangan Awal RKPД | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|------|---|-----------|---|----------------|-----------------------|---|-----------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Meningkatnya layanan administrasi kantor | | Rp 670.577.554 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Meningkatnya layanan administrasi kantor | | Rp 670.577.554 | |
| | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Surat Menyurat | Kabupaten | Tersedianya Materai dan benda pos lainnya | 12 bulan | Rp 990.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Surat Menyurat | Kabupaten | Tersedianya Materai dan benda pos lainnya | 12 bulan | Rp 990.000 | APBD |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. | Kabupaten | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan | Rp 63.360.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. | Kabupaten | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan | Rp 63.360.000 | APBD |
| | 03 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 bulan | Rp 89.250.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 bulan | Rp 89.250.000 | APBD |
| | 04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 bulan | Rp 9.271.510 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 bulan | Rp 9.271.510 | APBD |
| | 05 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | Rp 34.358.294 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | Rp 34.358.294 | APBD |
| | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kabupaten | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan | 12 bulan | Rp 29.370.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kabupaten | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan | 12 bulan | Rp 29.370.000 | APBD |
| | 07 | Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor. | Kabupaten | Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor | 12 bulan | Rp 4.906.550 | Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor. | Kabupaten | Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor. | 12 bulan | Rp 4.906.550 | APBD |
| | 08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. | Kabupaten | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | Rp 13.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. | Kabupaten | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | Rp 13.200.000 | APBD |
| | 09 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten | Terpenuhinya makan dan minum | 12 bulan | Rp 2.640.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten | Terpenuhinya makan dan minum | 12 bulan | Rp 2.640.000 | APBD |

| No. | Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|------|---|-------------------------|--|----------------|-----------------------|---|-------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | 10 | Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah. | Kabupaten | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah | 12 bulan | Rp 427.231.200 | Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah. | Kabupaten | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah | 12 bulan | Rp 427.231.200 | APBD |
| 2. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Meningkatnya layanan sapras aparatur | | Rp 436.095.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Meningkatnya layanan sapras aparatur | | Rp 436.095.000 | |
| | 01 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten | Terbangunnya konstruksi gedung kantor | 12 bulan | Rp 16.995.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten | Terbangunnya konstruksi gedung kantor | 12 bulan | Rp 16.995.000 | APBD |
| | 02 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kabupaten | Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas | 12 bulan | Rp 341.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kabupaten | Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas | 12 bulan | Rp 341.000.000 | APBD |
| | 03 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kabupaten | Tersedianya peralatan gedung kantor | 12 bulan | Rp 55.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan Karhutla | Kabupaten | Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang tersedia | 1 pkt | Rp 55.000.000 | APBD |
| | 04 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor | Kabupaten | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan dokumen perencanaan | 12 bulan | Rp 23.100.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor | Kabupaten | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan dokumen perencanaan | 12 bulan | Rp 23.100.000 | APBD |
| 3. | 05 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Meningkatnya penggunaan pakaian/ atribut sesuai standar | | Rp 53.350.000 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Meningkatnya penggunaan pakaian/ atribut sesuai standar | | Rp 53.350.000 | |
| | 01 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kabupaten | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 85 orang | Rp 53.350.000 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kabupaten | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 85 orang | Rp 53.350.000 | APBD |
| 4. | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis administratif/ manajemen SDM BPBD | | 17.600.000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis administratif/ manajemen SDM BPBD | | 17.600.000 | |
| | 01 | Pengembangan SDM | Luar Kabupaten/Provinsi | Bimbingan teknis penanggulangan bencana alam | 4 orang | Rp 17.600.000 | Pengembangan SDM | Luar Kabupaten/Provinsi | Bimbingan teknis penanggulangan bencana alam | 4 orang | Rp 17.600.000 | APBD |

| No. | Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|------|---|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 5. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Tersusun dan terdokumentasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu dan berkualitas | | 57.090.000 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Tersusun dan terdokumentasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu dan berkualitas | | 57.090.000 | |
| | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja, Ikhtisar realisasi kinerja | Kabupaten | Presentase dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu | 12 bulan | Rp 57.090.000 | Penyusunan laporan capaian kinerja, Ikhtisar realisasi kinerja | Kabupaten | Presentase dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu | 12 bulan | Rp 57.090.000 | APBD |
| | | Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar | | | | | Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar | | | | | |
| 6. | | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam | | Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | | Rp 2.012.998.725 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam | | Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | | Rp 2.012.998.725 | |
| | 01 | Pemberdayaan masyarakat/desa tangguh bencana | Kabupaten | Jumlah masyarakat/desa tangguh bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana | 13 kali | Rp 220.000.000 | Pemberdayaan masyarakat/desa tangguh bencana | Kabupaten | Jumlah masyarakat/desa tangguh bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana | 13 kali | Rp 220.000.000 | APBD |
| | 02 | Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana | Kabupaten | Jumlah dokumen Raperda penanggulangan bencana | 1 Raperda | Rp 300.000.000 | Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana | Kabupaten | Jumlah dokumen Raperda penanggulangan bencana | 1 Raperda | Rp 300.000.000 | APBD |
| | 03 | Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana | Kabupaten | Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana | 5 Desa | Rp 31.998.725 | Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana | Kabupaten | Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana | 5 Desa | Rp 31.998.725 | APBD |
| | 04 | Pembuatan leaflet, brosur dan baleho pengurangan resiko bencana | Kabupaten | Jumlah cetak leaflet, brosur dan baleho pengurangan resiko bencana | 40 SKPD/ instansi terkait/ 21 orang | Rp 250.000.000 | Pembuatan leaflet, brosur dan baleho pengurangan resiko bencana | Kabupaten | Jumlah cetak leaflet, brosur dan baleho pengurangan resiko bencana | 40 SKPD/ instansi terkait/ 21 orang | Rp 250.000.000 | APBD |
| | 05 | Kegiatan pembinaan kader siaga bencana | Kabupaten | Jumlah Siswa yang siaga bencana | 30 orang | Rp 250.000.000 | Kegiatan pembinaan kader siaga bencana | Kabupaten | Jumlah Siswa yang siaga bencana | 30 orang | Rp 250.000.000 | APBD |

| No. | Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|------|--|-----------|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | 06 | Dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten | Kabupaten | Jumlah dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten | 5 Dokumen | Rp 150.000.000 | Dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten | Kabupaten | Jumlah dokumen profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten | 5 Dokumen | Rp 150.000.000 | APBD |
| | 07 | Penyusunan rencana aksi (RAD) penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah dokumentasi RAD penanggulangan bencana kabupaten | 12 Dokumen laporan PB | Rp 341.000.000 | Penyusunan rencana aksi (RAD) penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah dokumentasi RAD penanggulangan bencana kabupaten | 12 Dokumen laporan PB | Rp 341.000.000 | APBD |
| | 08 | Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana | Kabupaten | Jumlah tenaga relawan yang dilatih dalam penanggulangan bencana | 5 Desa | Rp 340.000.000 | Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana | Kabupaten | Jumlah tenaga relawan yang dilatih dalam penanggulangan bencana | 5 Desa | Rp 340.000.000 | APBD |
| | 09 | Rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah rapat kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan | 12 kali rapat | Rp 130.000.000 | Rapat teknis kesiapsiagaan penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah rapat kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan | 12 kali rapat | Rp 130.000.000 | APBD |
| 7. | | Program Tanggap Darurat | | Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | | Rp 2.673.446.650 | Program Tanggap Darurat | | Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | | Rp 2.673.446.650 | |
| | 10 | Penyelenggaraan penanganan tanggap darurat di daerah tekena bencana | Kabupaten | 1.persentase korban bencana yang ditangani 2.penyelamatan jiwa/harta dan lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana 3.merespon semua kejadian bencana secara tepat dan tanggap | 100% | Rp 1.481.124.150 | Penyelenggaraan penanganan tanggap darurat di daerah tekena bencana | Kabupaten | 1.persentase korban bencana yang ditangani 2.penyelamatan jiwa/harta dan lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana 3.merespon semua kejadian bencana secara tepat dan tanggap | 100% | Rp 1.481.124.150 | APBD |
| | 11 | Pembentukan tim pembina dan pengarah dan tim koordinasi penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah peserta rakor dan tim yang terbentuk | 1 Tim | Rp 126.170.000 | Pembentukan tim pembina dan pengarah dan tim koordinasi penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah peserta rakor dan tim yang terbentuk | 1 Tim | Rp 126.170.000 | APBD |
| | 12 | Pencegahan dini pengendalian karhutla | Kabupaten | 1.melakukan patroli gabungan. 2.menyediakan informasi tentang bencana dengan memasang baliho dan cetak leaflet | 100% | Rp 271.645.000 | Pencegahan dini pengendalian karhutla | Kabupaten | 1.melakukan patroli gabungan. 2.menyediakan informasi tentang bencana dengan memasang baliho dan cetak leaflet | 100% | Rp 271.645.000 | APBD |

| No. | Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|------|--|-----------|---|----------------------|-----------------------|--|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | 13 | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dan sosialisasi PRB | Kabupaten | Jumlah sosialisasi patroli dan informasi yang disampaikan | 100% | Rp 84.760.500 | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dan sosialisasi PRB | Kabupaten | Jumlah sosialisasi patroli dan informasi yang disampaikan | 100% | Rp 84.760.500 | APBD |
| | 14 | Pembekalan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) | Kabupaten | Jumlah TRC yang dilatih dan di mantapkan | 61 orang | Rp 199.650.000 | Pembekalan dan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC-PB) | Kabupaten | Jumlah TRC yang dilatih dan di mantapkan | 61 orang | Rp 199.650.000 | APBD |
| | 15 | Pengaktifan posko penanggulangan bencana (PB) dan penanganan darurat di daerah terkena bencana | Kabupaten | Jumlah TRC yang terlibat dalam aktivasi posko dan penanganan darurat | 40 orang | Rp 266.200.000 | Pengaktifan posko penanggulangan bencana (PB) dan penanganan darurat di daerah terkena bencana | Kabupaten | Jumlah TRC yang terlibat dalam aktivasi posko dan penanganan darurat | 40 orang | Rp 266.200.000 | APBD |
| | 16 | Pembentukan dan pelatihan pemantapan manajemen pusdalops (pusat pengendalian operasional) penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah Pusdalops yang terbentuk dan terlatih | 50 orang | Rp 182.347.000 | Pembentukan dan pelatihan pemantapan manajemen pusdalops (pusat pengendalian operasional) penanggulangan bencana | Kabupaten | Jumlah Pusdalops yang terbentuk dan terlatih | 50 orang | Rp 182.347.000 | APBD |
| | 17 | Kegiatan peningkatan pengembangan SIM Data kebencanaan | Kabupaten | Jumlah dokumen pengembangan SIM data kebencanaan | 2 Dokumen laporan PB | Rp 66.550.000 | Kegiatan peningkatan pengembangan SIM Data kebencanaan | Kabupaten | Jumlah dokumen pengembangan SIM data kebencanaan | 2 Dokumen laporan PB | Rp 66.550.000 | APBD |
| 8. | | Program Penanggulangan Pasca Bencana | | Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | | Rp 785.000.000 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam | | Indeks Resiko Bencana Kabupaten dan Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten | | Rp 785.000.000 | |
| | 18 | Kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana | Kabupaten | Jumlah daerah terpulihkan prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana | 13 kecamatan | Rp 350.000.000 | Kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana | Kabupaten | Jumlah daerah terpulihkan prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana | 13 kecamatan | Rp 350.000.000 | APBD |
| | 19 | Kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana | Kabupaten | Jumlah daerah terpulihkan Sosial Ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana | 13 kecamatan | Rp 250.000.000 | Kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemulihan Sosial ekonomi di wilayah Pasca Bencana | Kabupaten | Jumlah daerah terpulihkan Sosial Ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana | 13 kecamatan | Rp 250.000.000 | APBD |

| No. | Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|---------------|------|---|-----------|---|----------------|-------------------------|---|-----------|---|----------------|----------------------|-------------------------|--|
| | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| | 21 | Kegiatan kajian kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan pembentukan tim JITUPASNA | Kabupaten | Terpenuhinya dokumen pengkajian data kebutuhan-kebutuhan pasca bencana, bencana rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dan pembentukan tim JITUPASNA dalam penanggulangan pasca bencana | 5 dokumen | Rp 150.000.000 | Kegiatan kajian kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan pembentukan tim JITUPASNA | Kabupaten | Terpenuhinya dokumen pengkajian data kebutuhan-kebutuhan pasca bencana, bencana rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dan pembentukan tim JITUPASNA dalam penanggulangan pasca bencana | 5 dokumen | Rp 150.000.000 | APBD | |
| | 22 | Kegiatan penyusunan pelaporan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi | Kabupaten | Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi | 3 dokumen | Rp 35.000.000 | Kegiatan penyusunan pelaporan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi | Kabupaten | Jumlah laporan pengawasan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi | 3 dokumen | Rp 35.000.000 | APBD | |
| JUMLAH | | | | | | Rp 6.711.157.929 | | | | | | Rp 6.711.157.929 | |

Mgosoft PDF Split Merge

Kuala Tungkal, Agustus 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. KOSASIH
NIP.19591230 198103 1 008

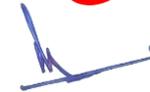
Tabel T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | | | Realisasi Capaian dan Proyeksi | | | | | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | Standar IKK (PP 6/2008) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SPM BENCANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Indeks resiko bencana kabupaten | 156 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| b) | Jumlah jenis potensi bencana kabupaten | 5 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kuala Tungkal, Agustus 2019

Mgosoft PDF Split Merge

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. KOSASIH
NIP.19591230 198103 1 008

RENJA SKPD BPBD

Tabel.T-VI.C.10
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 | | |
|------|---|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 04 | | | | | | | | | | |
| | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya layanan administrasi kantor | | | Rp 670.577.554 | | | Rp 737.635.309 | |
| | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan benda pos lainnya | Kabupaten | 12 bulan | Rp 990.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 1.089.000 |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kabupaten | 12 bulan | Rp 63.360.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 69.696.000 |
| | 03 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | Kabupaten | 12 bulan | Rp 85.250.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 93.775.000 |
| | 04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 9.271.510 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 10.198.661 |
| | 05 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 34.358.294 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 37.794.123 |
| | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Tersedianya barang cetakan dan pengadaan | Kabupaten | 12 bulan | Rp 29.370.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 32.307.000 |
| | 07 | Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor. | Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor | Kabupaten | 12 bulan | Rp 4.906.550 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 5.397.205 |
| | 08 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kabupaten | 12 bulan | Rp 13.200.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 14.520.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|---|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 09 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten | 12 bulan | Rp 2.640.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 2.904.000 |
| | 10 | Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah. | Kabupaten | 12 bulan | Rp 427.231.200 | APBD KAB | | 12 bulan | Rp 469.954.320 |
| | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | Rp 769.100.000 | | | | Rp 922.920.000 |
| | 21 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kabupaten | 1 pkt | Rp 56.000.000 | APBD KAB | - | 1 pkt | Rp 67.200.000 |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten | 1 pkt | Rp 315.000.000 | APBD KAB | - | 1 pkt | Rp 378.000.000 |
| | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kabupaten | 32 unit | Rp 353.600.000 | APBD KAB | - | 32 unit | Rp 423.600.000 |
| | 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten | 1 pkt | Rp 45.100.000 | APBD KAB | - | 18 unit | Rp 54.120.000 |
| | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | Rp 206.155.000 | | | | Rp 247.386.000 |
| | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kabupaten | 100% | Rp 206.155.000 | APBD KAB | - | 100% | Rp 247.386.000 |
| | 04 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | 30.000.000 | | | | 36.000.000 |
| | 05 | Pengembangan SDM | Luar Kabupaten/Provinsi | 1 paket | Rp 30.000.000 | APBD KAB | - | - | Rp 36.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 51.600.000 | | | | 61.920.000 |
| | 05 | Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD | Kabupaten | 14 dokumen | Rp 51.600.000 | APBD KAB | - | - | Rp 61.920.000 |
| 1 | 19 | Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 1 | 19 | 06 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam | | | Rp 2.224.540.000 | | | Rp 2.669.448.000 |
| | 06 | Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Kabupaten | 12 bulan | Rp 1.362.300.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 1.634.760.000 |
| | 07 | Pembentukan Tim Pembinaan dan Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) | Kabupaten | 1 Tim | 118.000.000 | APBD KAB | - | 1 Tim | Rp 138.000.000 |
| | 08 | Pembekalan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana | Kabupaten | 61 orang | 100.790.000 | APBD KAB | - | 61 orang | Rp 120.948.000 |
| | 09 | Pencegahan Dini dan Pengendalian Karhutla | Kabupaten | 12 bulan | 402.250.000 | APBD KAB | - | 12 bulan | Rp 482.700.000 |
| | 10 | Kajian Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Kabupaten | 5 dokumen | 57.825.000 | APBD KAB | - | 5 dokumen | Rp 69.390.000 |
| | 11 | Pembinaan Kader Siaga Bencana | Kabupaten | 5 Sekolah | 63.875.000 | APBD KAB | - | 5 Sekolah | Rp 76.650.000 |
| | 12 | Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana | Kabupaten | 2 Desa | 50.400.000 | APBD KAB | - | 2 Desa | Rp 60.480.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2018 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019 | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Sosialisasi Daerah Rawan Bencana | Tersebar nya informasi di desa-desa rawan bencana | Kabupaten | 6 kali | 72.100.000 | APBD KAB | - | 6 kali | Rp 86.520.000 |
| JUMLAH | | | | | Rp 3.951.972.554 | | | | Rp 4.675.309.309 |

Mgosoft PDF Split Merge